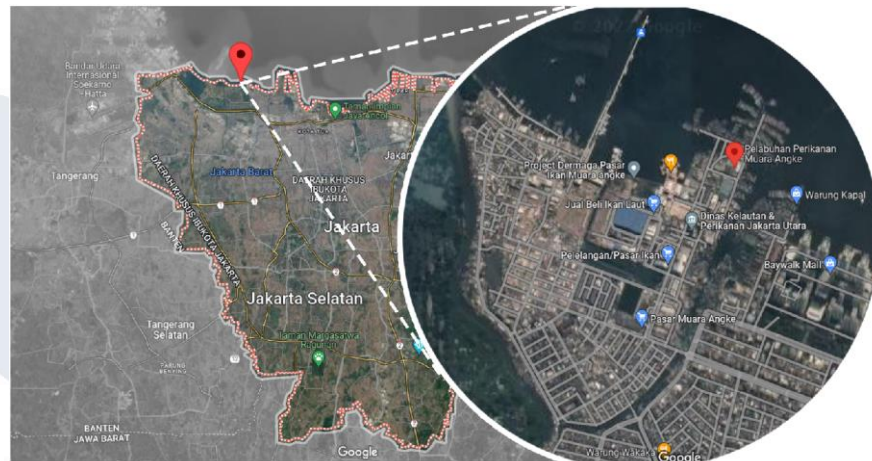


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan) merupakan kawasan yang memiliki peran penting terhadap perekonomian masyarakat, terutama dari hasil sumber daya alamnya (Novaldi & Yuono, 2020). Pelabuhan PPI juga merupakan bagian dari area pesisir yang ditujukan untuk produktivitas dan perekonomian. Namun pelabuhan seringkali rentan mengalami penurunan kualitas hasil tangkap perikanan yang dipengaruhi oleh kinerja alur kegiatan, terutama kesinambungan terhadap para pelaku kegiatan dengan kesalahan penataan kawasan. Kesalahan penataan kawasan pelabuhan yang tidak efisien akan menghilangkan potensi pemanfaatan dan nilai kinerja tempat (Sukuryadi, 2016). Salah satu kawasan pesisir/ tepi laut pelabuhan yang diduga belum memiliki penataan kawasan yang baik ialah Muara Angke.



Gambar 1.1 Lokasi Kawasan Pelabuhan Muara Angke
(Sumber: Google Maps dan diolah kembali oleh data penulis, 2023)

Pelabuhan Muara Angke merupakan salah satu kawasan pesisir dengan produksi sumber daya alam ikan potensial sebagai area Pangkalan Pendaratan Ikan

(PPI) terbesar di Jakarta dengan intensitas aktivitas perekonomian yang cukup tinggi (Najah1, Lubis2, Solihin2, & Pane2, 2015). Disisi lain Muara Angke tergolong sebagai kawasan minapolitan, dimana hampir sebagian masyarakat memiliki mata pencaharian utama dibidang perikanan. Minapolitan sendiri merupakan kota/ kawasan pesisir yang biasanya sebagian besar aktivitas masyarakat didominasi oleh perikanan dengan kehidupan mirip perkotaan (Kusumaningrum, 2018). Seharusnya Muara Angke sebagai kawasan minapolitan memiliki keunggulan disektor perikanan untuk mensejahterakan masyarakat terutama sebagai salah satu PPI terbesar di Jakarta.

Namun berdasarkan hasil data perikanan dan dari segi kerja produktivitas, para nelayan Muara Angke cenderung mengalami penurunan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan, yakni kinerja para pekerja di Pelabuhan Muara Angke sangat bergantung terhadap sumber daya ikannya, namun produktivitasnya cenderung menurun tidak seperti dahulu (Pontoh, 2010). Berikut merupakan data penurunan produktivitas Pelabuhan Muara Angke.

Tahun	Qp/Qt x 100%	Np/Nt x 100%	Indeks Nilai Produksi
2004	36,34	14,67	0,40
2005	35,31	11,40	0,32
2006	48,29	16,33	0,34
2007	41,09	13,70	0,33
2008	42,99	12,82	0,30
2009	27,59	5,21	0,19
2010	15,55	3,42	0,22
2011	15,24	3,18	0,21
2012	20,04	3,33	0,17
2013	18,71	2,84	0,15

Keterangan :

- I : Indeks Relatif Nilai Produksi
- Np : Nilai Produksi Perikanan di PPI Muara Angke (Rp)
- Nt : Nilai Produksi Perikanan di DKI Jakarta (Rp)
- Qp : Kuantitas Volume Produksi perikanan di PPI Muara Angke (ton)
- Qt : Kuantitas Volume Produksi perikanan di DKI Jakarta (ton)
- 100 : Merupakan persentase dari volume produksi perikanan dan persentase dari nilai produksi perikanan.

Gambar 1.2 Gambar Data Penurunan Produktivitas Muara Angke dari 2004 – 2013

(Sumber: Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan DKI Jakarta 2014

dalam (Najah, Lubis, Solihin, & Pane, 2015)

Berdasarkan hasil data produktivitas perikanan Pelabuhan Muara Angke di atas, menunjukan penurunan setiap tahunnya dari 2004 hingga 2013 (Najah1, Lubis2, Solihin2, & Pane2, 2015). Data produktivitas tersebut didapat melalui

perbandingan dari nilai produksi terhadap kuantitas produksi perikanan yang dihasilkan Muara Angke. Penurunan produksi ikan pada data tersebut terjadi karena sistem penanganan ikan yang kurang baik, yakni selama proses pasca penangkapan hingga sampai tahap pendistribusian dan berdampak pada menurunnya mutu ikan seiring dengan lamanya waktu proses distribusi (Najah1, Lubis2, Solihin2, & Pane2, 2015).

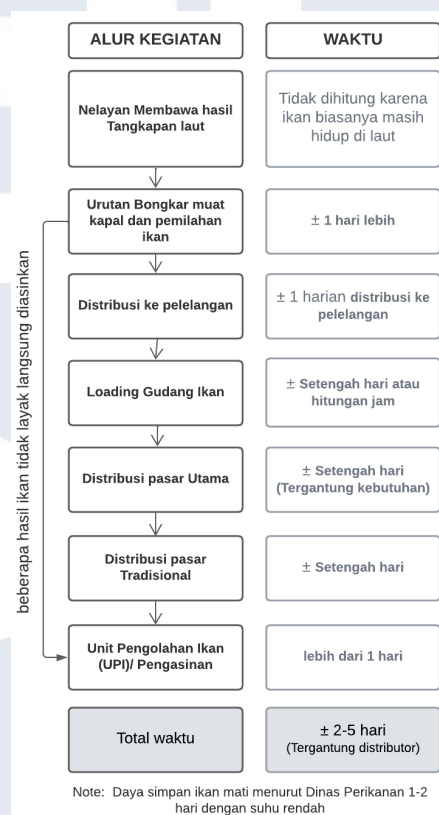
Penurunan produktivitas perikanan di Muara Angke ternyata terus berlanjut hingga tahun 2020 (Rizky, 2020). Dari hasil pengamatan langsung penulis di Pelabuhan Muara Angke menunjukkan hasil yang cukup mendukung terhadap pernyataan penelitian sebelumnya terkait dengan menurunnya produktivitas perikanan di Pelabuhan Muara Angke.



Gambar 1.3 Hasil Tangkapan Ikan yang Kurang Baik & akan Diasinkan
(Sumber: Data penulis, 2023)

Dapat diamati berdasarkan gambar yang diperoleh penulis saat melakukan pengamatan langsung di Pelabuhan Muara Angke menunjukkan terdapat beberapa hasil tangkap ikan yang kurang segar karena proses perjalanan distribusi dari Pelabuhan Muara Angke hingga ke titik-titik industri perikanan cukup lama, sehingga ikan tersebut terpaksa diasinkan karena tidak layak dipasarkan. Fakta tersebut didukung dengan pernyataan penelitian sebelumnya mengenai Pelabuhan Muara Angke, yakni penurunan kualitas ikan pada Pelabuhan Muara Angke terjadi karena kurangnya dukungan kawasan yang mendukung aktivitas perikanan pelabuhan (Najah, Lubis, Solihin, & Pane, 2015).

Sistem distribusi ikan yang baik akan menentukan hasil kualitas dari pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang cepat membusuk (*perishable*) (Sunea, 2010). Tentunya efisiensi distribusi dan kegiatan bekerja perlu memerhatikan setiap kesinambungan alur kegiatan kerja perikanan pada kawasan Pelabuhan Muara Angke. Berikut merupakan alur kegiatan perikanan pada Pelabuhan Muara Angke yang diperoleh penulis saat melakukan pengamatan langsung.



Gambar 1.4 Urutan Alur dan Lama Kegiatan Kerja Perikanan Pelabuhan Muara Angke Berdasarkan Hasil Pengamatan Penulis
(Sumber: Data penulis, 2023)

Berdasarkan alur kegiatan perikanan Pelabuhan Muara Angke menunjukkan adanya kesinambungan kegiatan satu sama lain yang saling tersusun secara bertahap dan memiliki urutan yang tidak bisa ditukar. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan kegiatan dengan penataan fungsi lahan memiliki andil peran yang cukup besar untuk memengaruhi produktivitas perikanan. Keterhubungan setiap aktivitas

perikanan akan menghidupi kawasan Pelabuhan Muara Angke yang tentunya tak terlepas dari sistem kerja penataan kawasan. Penataan kota yang kurang baik dapat memengaruhi kinerja pada kawasan khususnya efektifitas dan efisiensi yang dihasilkan suatu kawasan (Wijayanti, 2012). Namun, dari data pengamatan penulis, ternyata proses alur perikanan pada Pelabuhan Muara Angke memakan waktu kurang lebih 2 -5 hari, dimana melebihi batas daya simpan ikan yang baik berdasarkan dinas perikanan, yakni berkisar 1-2 hari dengan suhu rendah (tidak terpapar sinar matahari) (Perikanan, 2020).

Dugaan penulis terhadap turunnya produktivitas ikan, disebabkan oleh pembentukan penataan kawasan Pelabuhan Muara Angke yang lambat laun tidak lagi menyesuaikan dengan alur kegiatan perikanan. Hal ini didukung dalam undang-undang No 26 tahun 2007 mengenai penataan ruang, bahwa penataan ruang bertujuan agar mewujudkan kawasan yang produktif dan berkelanjutan serta memperhatikan keterpaduan antara sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap fungsi pemanfaatan ruang. Karena mutu kualitas ikan yang kurang baik pada kawasan Muara Angke dipengaruhi oleh lamanya proses distribusi (Budiman, 2010). Hasil mutu ikan yang kurang baik menurunkan produktivitas warga Muara Angke.

Secara garis besar penataan ruang kota yang baik harus berdasarkan pada potensi, kendala masyarakat dan penyesuaian terhadap kebutuhan kerja eksisting kawasan (Mokodongan & Moniaga, 2019). Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara, terhadap para nelayan Muara Angke, dimana mereka dan para pekerja pasar lainnya merasa resah terhadap beberapa titik distribusi ikan yang dianggap cukup jauh dari Pelabuhan dan cenderung harus keliling kawasan dalam mendistribusikan hasil ikan. Berikut merupakan rangkuman hasil wawancara lapangan dari beberapa pekerja pada Pelabuhan Muara Angke yang dilakukan oleh penulis.

No	Pertanyaan	Hasil Wawancara	Point Kesimpulan
----	------------	-----------------	------------------

1	Kenapa hasil tangkap ikan tersebut tidak dapat dipasarkan dan apa penyebabnya?	Ikan tersebut kurang segar karena pembeli hanya memilih ikan yang bagus dari warna insang dan daging yang tidak lembek. Kualitas ikan kurang baik karena ikan terlalu lama di inep/ di diamkan di ruang terbuka saat distribusi (berdasarkan alur kerja hingga ke UPI bisa mencapai 2-5 hari), sehingga terpapar sinar matahari cukup lama yang membuat bongkahan es cepat mencair saat melakukan proses perjalanan distribusi yang cukup lama sebelum ke pelelangan. Air es mempercepat pembusukan terutama ikan di bagian paling bawah keranjang yang tertumpuk dan inep	Lama proses alur kerja perikanan memengaruhi proses penanganan ikan yang berdampak pada mutu ikan.
2	Apakah terdapat kendala dalam melakukan proses penyaluran hasil tangkap ikan	Hasil angkut ikan perlu disalurkan ke tempat pelelangan ikan yang cenderung jauh dan terpisah-pisah untuk setiap distributor (tidak pada satu pengelompokan tempat) sedangkan sirkulasi menuju Pelabuhan hanya satu. Hasil ikan setelah di pelelangan, perlu dikirim lagi menuju ke pasar utama ataupun pasar tradisional yang tidak memiliki sirkulasi langsung dengan masing-masing penempatan lokasi pelelangan yang berbeda-beda	Penataan lahan menjadi kendala bagi pelaku kegiatan dalam melakukan proses alur kegiatan kerja dan menjadi faktor utama yang membuat lama proses alur kerja perikanan.
3	Apa yang akan dilakukan dengan hasil tangkap yang tidak layak dijual	Beberapa hasil tangkapan sisa ikan yang kurang segar akan dioalah atau diasinkan, namun peletakan area pengolahan/ pengasinan ikan cenderung jauh dari pelabuhan (dekat pemukiman nelayan)	Ikan yang dengan mutu yang kurang baik dapat menurunkan produktivitas

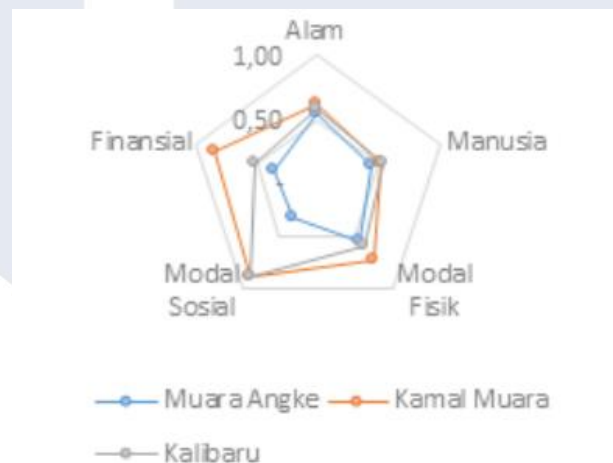
Tabel 1.1 Hasil Wawancara Pekerja Nelayan Muara Angke

(Sumber: Data penulis, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, terdapat beberapa kesimpulan yang nantinya akan menjadi fokus penulis dalam mengkaji penelitian. Pertama, menurut pekerja nelayan di eksisting, alur kerja perikanan Pelabuhan Muara Angke memiliki proses cukup lama dan berdampak pada mutu ikan yang menurun. Kedua,

adanya ketidaksesuaian lahan yang membuat lahan cenderung kurang efektif dan mengurangi kemudahan alur kegiatan kerja menjadi lama. Ketiga, mutu ikan yang kurang baik dapat menurunkan produktivitas.

Produktivitas perikanan yang menurun tentunya akan memengaruhi sisi ekonomi kawasan. Penurunan ekonomi pada Muara Angke berpotensi besar dalam memengaruhi daya saing kinerja antar kawasan maritim, karena produktivitas perikanan Muara Angke yang menjadi aset ekonomi utama dalam kehidupan kawasan.



Gambar 1.5 Diagram Daya Kerentanan Ekonomi Pelabuhan Jakarta Utara Tahun 2019
(nilai kerentanan ekonomi berkisar 0-1 semakin kecil maka nelayan semakin mengalami kerentanan dan sebaliknya)
(Sumber: Robin, Kurnia, Soewardi, Setyobudiandi, & Dharmawan, 2018)

Berikut merupakan data kerentanan ekonomi Pelabuhan Muara Angke tahun 2019. Grafik berwarna biru merupakan tingkat kerentanan ekonomi Pelabuhan Muara Angke dimana menunjukkan indeks yang semakin kecil dari nilai 1, sehingga Pelabuhan Muara Angke mengalami kerentanan ekonomi paling tinggi dibanding ketiga pelabuhan ikan lainnya di Jakarta Utara, yakni Kamal Muara dan kalibaru (Robin, Kurnia, Soewardi, Setyobudiandi, & Dharmawan, 2018). Padahal ketiga pelabuhan tersebut sama-sama berada pada kawasan perairan yang mengakomodasi

Pangkalan Pendaratan Ikan serta masuk dalam golongan sebagai kawasan minapolitan dengan mata pencaharian utama di bidang perikanan.

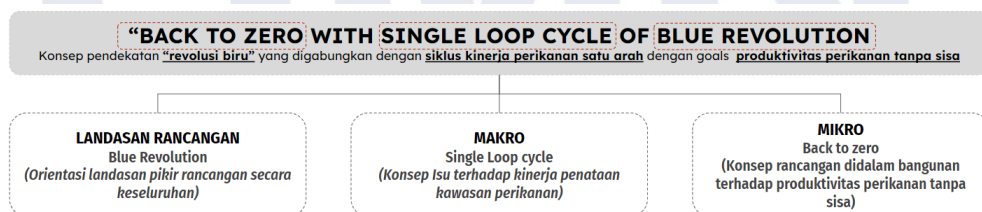
Dari data tersebut menunjukkan bahwa Pelabuhan Muara Angke kalah bersaing dari segi kerentanan ekonomi dibanding ketiga pelabuhan lainnya di Jakarta Utara, padahal Pelabuhan Muara Angke merupakan salah satu pelabuhan ikan terbesar di Jakarta. Analogi korelasi daya saing dengan penataan lahan, ialah jika daya saing suatu kawasan menurun maka secara tidak langsung menunjukkan kinerja kawasan tersebut kurang baik. Menurunnya produktivitas perikanan ialah sama-sama diduga dari ketidaksesuaian penataan lahan yang mengakibatkan hubungan timbal balik. Oleh karena itu, penataan lahan yang belum baik akan menurunkan kinerja kawasan/ kota dalam mengakomodasi kegiatan utama kawasan. Kinerja kota seringkali disebut sebagai *good city form*, dimana pembangunan dan pemanfaatan suatu lahan harus mempertimbangkan konteks lingkungan lahan dengan kualitas kerja penghuninya (Yananda, 2011). Secara harfiah, produktivitas perikanan bisa didapat dari kualitas kinerja kawasan dan tentunya dipengaruhi dari aspek penataan kawasan. Dengan adanya fenomena yang terjadi peneliti ingin mengerahui kinerja penataan kawasan pelabuhan Muara Angke terkait alur perikanan dan dampaknya terhadap produktivitas.

Dugaan produktivitas perikanan yang menurun karena ketidaksesuaian penataan lahan menjadi latar belakang penulis untuk menghadirkan konsep pendekatan “Revolusi Biru satu arah tanpa sisa” untuk mengedepankan interaksi kawasan terhadap potensi laut dan maritim. Jika dilihat secara dasar, pengertian Revolusi Biru, ialah menciptakan model kawasan yang berorientasi pada maritim dengan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi perikanan kelautan (Indriani, Hanny, & Frits, 2014). Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan jika tujuan Revolusi Biru berusaha untuk membangkitkan produktivitas perikanan dengan konteks presepektif skala kawasan melalui orientasi penataan kawasan dengan fokus alur perikanan yang baik sesuai dengan isu permasalahan utama di Muara Angke.

Sesuai dengan pengertian diatas, hubungan prinsip “Revolusi Biru” dengan Penataan Kawasan pada kasus ini, ialah mengarahkan cara pandang pembangunan berkelanjutan kawasan pesisir (dalam konteks ini berfokus pada penataan lahan) dari ekosistem darat menuju maritim. Tujuannya untuk mengoptimalkan produksi kelautan dan perikanan yang menjadi ekonomi utama Muara Angke sebagai kawasan minapolitan seharusnya.

Tentunya prinsip Revolusi Biru relevan dengan isu masalah Pelabuhan Muara Angke yang mengalami penurunan produktivitas perikanan, sehingga berdampak pada menurunnya daya perekonomian antar kawasan dekat perairan. Hal ini didukung dengan pernyataan bahwa pembangunan ekonomi perikanan dan kelautan sangat diperlukan bagi daerah yang memiliki sumber daya ikan potensial, penerapan revolusi biru diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan dan menjaga keberlanjutan kawasan pesisir sesuai kapasitas fungsinya (Indriani, Hanny, & Frits, 2014).

Setelah mengetahui dan memahami dampak penataan lahan terhadap kinerja perikanan Muara Angke, penulis akan menjadikan analisis sebagai landasan untuk merancang, dan setiap kekurangan mengenai penataan lahan akan direspon dengan teori acuan analisis. Oleh karena itu, berdasarkan pertanyaan dan isu permasalahan yang diambil, penulis mengusung konsep “*Revolusi Biru Satu Arah Tanpa Sisa (Back to Zero With Single Loop Cycle of Blue Revolution)*”.



Gambar 1.6 Diagram Konsep Rancangan

(Sumber: data penulis, 2023)

Konsep ini merupakan penggabungan atas prinsip “Revolusi Biru” sebagai landasan rancangan secara keseluruhan dengan “*single loop cycle*” sebagai turunan

dari teori penataan lahan dalam merespon isu masalah makro, yakni alur siklus kinerja perikanan yang terfokus satu arah dalam membentuk orientasi aktivitas perikanan lurus tepat sasaran. Kemudian hasil dari siklus perikanan tersebut memiliki *goals* “*Back to Zero*”, yakni memanfaatkan dan mengolah hasil industri perikanan seoptimal mungkin di dalam rancangan hingga tak bersisa, sehingga benar-benar mendukung produktivitas perikanan yang baik. Penulis akan menjelaskan konsep secara detail pada kajian teori BAB II.

Dengan adanya penataan kawasan pelabuhan Muara Angke, diharapkan dapat meningkatkan kembali grafik kinerja produktivitas perikanan dan industri pelabuhan terkait dengan isu penataan lahan dan produktivitas perikanan. Penulis juga berharap hasil penelitian tentang kinerja penataan kawasan dapat menjadi acuan dasar dalam mengembangkan kawasan-kawasan pelabuhan lainnya. Oleh karena itu, konsep yang diusung berguna untuk menjawab **“Bagaimana Penerapan konsep revolusi biru satu arah tanpa sisa terhadap kinerja penataan alur perikanan pada rancangan kawasan pelabuhan Muara Angke ?”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah penelitian yang ingin diteliti oleh penulis, antara lain:

1. Dugaan penataan kawasan Pelabuhan Muara Angke yang belum mengikuti alur kerja perikanan.
2. Dampak kinerja dari penataan kawasan Pelabuhan Muara Angke terkait alur kerja perikanan terhadap produktivitas perikanan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja penataan lahan terhadap produktivitas perikanan, Penulis ingin merespon solusi atas permasalahan yang ada melalui perancangan, antara lain:

1. Penataan kawasan yang tidak mengikuti alur kerja perikanan.
2. Menurunnya produktivitas perikanan Muara Angke.

1.3. Batasan Masalah

Kajian penataan kawasan pada Muara Angke memerhatikan beberapa aspek faktor yang menjadi batasan dalam melakukan penelitian dan perancangan. Penulis membagi batasan masalah menjadi 2 bagian, yakni: 1. Batasan penelitian dan 2. Batasan perancangan.

1.3.1. Batasan Masalah Penelitian



Gambar 1.7 Batasan Wilayah Penelitian Kawasan Pelabuhan Muara Angke
(Sumber: Google Maps dan diolah kembali oleh penulis, 2023)

Lokasi area yang dikaji berada tepat di Pelabuhan utama Muara Angke Jl. Pendaratan Udang No.10, Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Besar luas tapak yang dikaji 34,9 hektar. Batasan pemilihan tapak diambil berdasarkan area yang mencakup alur kegiatan kerja perikanan terhadap Pelabuhan Muara Angke, sedangkan area luar penelitian site lainnya merupakan pemukiman tak berizin nelayan serta pemukiman Muara Angke yang secara tak langsung menjadi batas wilayah.

Subjek penelitian yang akan dikaji berasal dari pelaku yang langsung terkena dampak penataan ruang dan aktivitas alur kegiatan perikanan Pelabuhan Muara Angke. Pelaku terbagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu: 1. Nelayan, merupakan pelaku utama dalam terbentuknya aktivitas pada area Pelabuhan yang paling terdampak terhadap sistem penataan kawasan serta siklus alur kerja pada setiap fungsi kawasan. 2. Pedagang pasar dan pelelangan, menjadi pelaku ke dua yang terdampak dalam alur distribusi tangkapan hasil alam. Pedagang pasar akan menjadi transisi perantara dari pengungjung pembeli dan para nelayan sekitar hingga para warga

kampung nelayan. 3. Warga pengelola UPI (Unit Pengolahan Ikan) sektor informal, menjadi pelaku yang merespon terhadap kehadiran para nelayan hingga pengunjung dari luar. Kehadiran sektor informal menjadi peluang terhadap penataan segi aspek pariwisata.

Analisis kinerja terhadap alur kerja perikanan hanya akan dilihat melalui segi penataan kawasan saja, karena proses setiap alurnya merupakan sistem keterhubungan antar fungsi kawasan industri perikanan pelabuhan yang saling menghidupi terutama distribusi ekonomi. Sehingga hal yang berkaitan terhadap sumber daya manusia, waktu temporal, kelembagaan terhadap pemangku kepentingan, cuaca alam dan lain-lain tidak masuk dalam cakupan penelitian. Tentunya pendekatan penataan lahan ditujukan dalam bentuk pengembangan industri perikanan. Oleh karena itu variabel penelitian yang akan digunakan dalam mengkaji Pelabuhan Muara Angke menggunakan teori elemen penataan kota dari Hamid Shirvani (1985) yang cocok dalam mengidentifikasi kualitas penataan fungsi dan pergerakan bagi masyarakat Pelabuhan. Terdapat dua poin dalam elemen penataan kota yang telah direduksi oleh penulis terkait dengan pergerakan aktivitas alur kegiatan pelabuhan saja, yaitu:

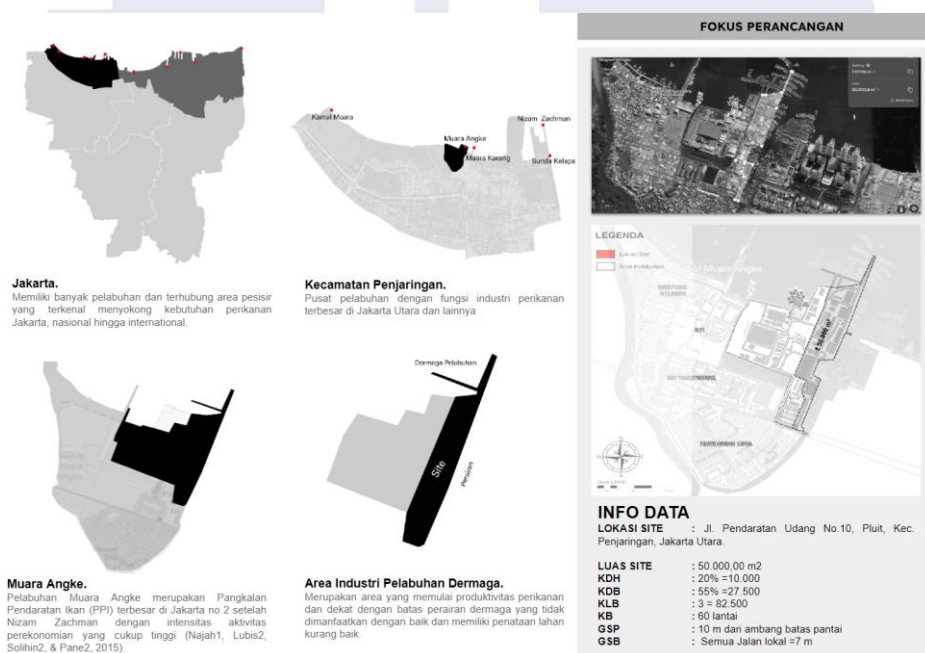
- A. Penggunaan Lahan yang dijelaskan melalui kriteria penggunaan lahan kota, seperti Multifungsi lahan, kekompakan pemanfaatan lahan, integrasi antar tata guna lahan.
- B. Akses sirkulasi (aksesibilitas) yang akan dijabarkan melalui kriteria penilaian sirkulasi, seperti Dimensi Jalur sirkulasi dan kejelasan orientasi.

Selanjutnya penentu tolak ukur produktivitas kinerja terhadap penataan kota akan menggunakan teori kualitas kinerja kota dari Kevin Lynch (1981) yang bertujuan untuk menilai penataan kota Pelabuhan Muara Angke terkait kinerja perikanan dan membantu menjadi pijakan dalam merancang kawasan untuk meningkatkan produktivitas perikanan. Beberapa kriteria kinerja kota, yaitu:

1. *Vitality*

2. *Fit*
3. *Access*
4. *Control*
5. *Efisiensi*
6. *Justice*

1.3.2. Batasan Masalah Perancangan



Gambar 1.8 Batasan Wilayah Perancangan Kawasan Pelabuhan Muara Angke
(Sumber: Google Maps dan diolah kembali oleh penulis, 2023)

Detail lokasi rancangan berlokasi di area industri perikanan dekat dengan kawasan pesisir. Lokasi area yang dirancang berada tepat di Pelabuhan Utama Muara Angke Jl. Pendaratan Ikan Muara Angke, Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Besar luas tapak yang dikaji 50.000 m² dengan KDH (koefisien dasar hijau) sebesar 20% atau 10.000 m². Sedangkan besaran KDB (koefisien dasar bangunan) sebesar 55% atau sebesar 27.500 m² dengan maksimal ketinggian 60 lantai, garis sepadan pantai 10 m serta jalan lokal lebar 7m. Batasan pemilihan tapak diambil berdasarkan area yang mencakup alur kegiatan kerja perikanan terhadap Pelabuhan Muara Angke yang paling vital, dan

paling banyak berbatasan dengan perairan yang ditujukan untuk pengembangan pesisir. Berikut beberapa batasan perancangan pelabuhan industri perikanan Muara Angke, antara lain:

1. Wilayah perancangan menggunakan lahan yang didominasi oleh fungsi industri perikanan vital dan memiliki aktivitas awal perikanan, sehingga rancangan dapat membentuk alur perikanan dari awal.
2. Wilayah perancangan menggunakan sisi area yang bersentuhan dengan pesisir perairan untuk mempermudah pembentukan orientasi perikanan kawasan.
3. Usulan fungsi rancangan yang diterapkan menjadi pemenuhan kebutuhan kapasitas di masa mendatang.
4. Usulan fungsi rancangan memiliki target market berbeda agar tidak mengganggu fungsi yang ada pada eksisting.

1.4. Tujuan Penelitian dan Perancangan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penelitian ini bertujuan untuk memahami pemetaan pola alur kerja perikanan yang dibutuhkan oleh kawasan Muara Angke. Hasil dari pemetaan alur perikanan digunakan untuk mengetahui hasil kinerja penataan kawasan Pelabuhan Muara Angke terkait alur kerja perikanan terhadap produktivitas perikanan.

Setelah mengetahui penyebab dari isu masalah, dilanjutkan dengan perancangan yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kinerja penataan lahan dan produktivitas perikanan yang telah diidentifikasi dengan mengusung konsep “*Revolusi Biru Satu Arah Tanpa Sisa (Back to Zero With Single Loop Cycle of Blue Revolution)*”. Dengan demikian, usulan perancangan industri perikanan pada kawasan Muara Angke diharapkan dapat memperbaiki sistem kinerja penataan lahan terkait alur perikanan dan meningkatkan kembali produktivitas perikanan.